

## MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, FASILITAS PEMBELAJARAN, DAN MUTU SEKOLAH

Oleh:

Ulpha Lisni Azhari<sup>1</sup>

Dedy Achmad Kurniady<sup>2</sup>

Universitas Pendidikan Indonesia

[ulphaazhari@yahoo.com](mailto:ulphaazhari@yahoo.com)<sup>1</sup>

[Dedy\\_Achmad@upi.edu](mailto:Dedy_Achmad@upi.edu)<sup>2</sup>

### Abstrak

Mutu sekolah berkaitan langsung dengan bagaimana kualitas pendidikan pada sebuah satuan pendidikan. Dalam pencapaian mutu sekolah yang baik perlu diperhatikan mutu guru, mutu siswa, kultur dan disiplin sekolah, serta fasilitas dan pembiayaan pendidikan. Penelitian ini memfokuskan pada kajian bagaimana apakah terdapat pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah. Tujuannya untuk mengetahui gambaran dan menganalisis pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel terhadap 33 kepala sekolah SMP pada sub-rayon 1 di Kabupaten Bandung Barat. Teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah secara bersama-sama memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan. Berdasarkan temuan tersebut maka direkomendasikan untuk sekolah agar memperhatikan tahapan manajemen pembiayaan pendidikan terutama pada saat perencanaan dan pengawasan pembiayaan. Sedangkan pada prinsip pemanfaatan fasilitas perlu diperhatikan efisiensi terhadap penggunaan fasilitas pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu sekolah.

**Kata Kunci :** *Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pendidikan, Mutu Sekolah*

---

### Abstract

*The quality of education is directly related to how the quality of education in an educational unit. In achieving a good quality of education need to be considered in teacher quality, student quality, culture and school discipline, as well as facilities and financing of education. This study focuses on the study of how the influence of financial management of education and learning facilities on quality of education. The goal is to describe and analyze the influence of education financing and facility management of learning on educational quality. This research uses descriptive method with quantitative approach. Sampling was filled to 33 junior high school principal in the sub-rayon 1 in Kabupaten Bandung Barat. Techniques of analysis using descriptive analysis and inferential analysis. These results indicate that the effect of the influence of education financing and facilities management of the quality of education learning together provide a strong and significant influence. Based on these findings, it is recommended to schools to pay attention to the stages of education finance management, especially in the planning and supervision of financing. While in principle the use of the facility to consider the efficiency of the use of learning facilities in order to achieve the objectives of learning and improving the quality of education.*

**Keyword:** *Financing Management Education, Educational Facilities, Quality Schools*

## PENDAHULUAN

Kualitas sebuah negara dapat dilihat dari beberapa faktor, diantaranya adalah faktor pendidikan. Sekolah merupakan sebuah lembaga yang dipersiapkan untuk menyediakan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan kualitas suatu negara. Oleh karena itu, upaya

meningkatkan kualitas sumber daya alam tidak dapat terpisah dari pendidikan.

Koswara dan Triatna (2010, hlm 275) menyatakan bahwa pendidikan yang bermutu dilihat dari sisi *input*, *proses*, *output* maupun *outcome*. *Input* pendidikan yang bermutu adalah guru-guru yang bermutu, peserta didik yang

bermutu, kurikulum yang bermutu, fasilitas yang bermutu, dan berbagai aspek penyelenggara pendidikan yang bermutu. *Proses* pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang bermutu. *Output* pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang disyaratkan. Dan *outcome* pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau terserap pada dunia usaha atau dunia industri.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan. Melalui perencanaan strategik di bidang pendidikan, lembaga pendidikan mampu menyiapkan *output*.

Berdasarkan daftar penerima dana BOS di Kabupaten Bandung Barat, pada sub-rayon 1 terdapat 33 sekolah mendapatkan dana BOS sebagai sumber pembiayaan pendidikan, sedangkan 3 sekolah lainnya merupakan sekolah swasta dengan sumber pembiayaan dari orang tua dan yayasan. Penggunaan Dana BOS SMP Sub-Rayon 1 Kabupaten Bandung Barat Tahun 2014 menjelaskan penggunaan dana BOS pada 33 Sekolah Menengah Pertama di sub-rayon 1 Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2014 adalah sebesar Rp 13.086.434,047. Berdasarkan jumlah dana tersebut, pada masing-masing sekolah diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan dana pendidikan tersebut berdasarkan pada petunjuk teknis untuk mencapai visi dan misi sekolah.

Biaya pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Untuk mencapai mutu sekolah yang baik, biaya pendidikan harus dikelola dengan

optimal. Oleh karena itu, tahapan pada manajemen pembiayaan pendidikan perlu diperhatikan. Pada dasarnya tujuan manajemen pembiayaan pendidikan adalah mencapai mutu sekolah yang diharapkan. Pada setiap proses tahapan manajemen pembiayaan perhatian utamanya adalah pencapaian visi dan misi sekolah. Tahapan manajemen pembiayaan pendidikan melalui tahapan perencanaan pembiayaan pendidikan, tahapan pelaksanaan pembiayaan, dan pengawasan pembiayaan pendidikan.

Fasilitas pembelajaran merupakan faktor lain yang mempengaruhi mutu sekolah. Dalam pencapaian mutu sekolah, fasilitas pembelajaran merupakan sarana dan prasarana yang digunakan oleh tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan. Pemanfaatan fasilitas pembelajaran perlu dikelola dengan baik agar terhindar dari pemborosan dan tidak tepatnya pemanfaatan fasilitas. Oleh karena itu, diperlukan manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan prinsipnya agar peningkatan mutu sekolah dapat tercapai.

Permasalahan yang terjadi dalam lembaga pendidikan terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan antara lain adalah sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang tersendat, tidak mendukung visi, misi dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Di satu sisi lembaga pendidikan perlu dikelola dengan baik (*good governance*), sehingga menjadi lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai penyimpangan yang dapat merugikan pendidikan.

Jika memandang dari sisi manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran, beberapa kendala mengenai perencanaan fasilitas

diantaranya adalah sulitnya menyesuaikan kebutuhan peserta didik jika harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, banyaknya kebutuhan fasilitas yang dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan harus disertai dengan perincian biaya yang membengkak. Selain itu juga pembiayaan menjadi faktor penghambat lainnya dalam pengadaan fasilitas pembelajaran. Pengawasan fasilitas

seharusnya dilakukan oleh pemerintah maupun pimpinan sekolah, seperti kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana. Akibat dari kurangnya manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang dilakukan sekolah, peserta didik menjadi kurang merasakan manfaat dari fasilitas tersebut. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan dalam mutu sekolah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini berfokus terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari subyek yang diteliti dan menggunakan. Dengan menggunakan metode deskriptif diharapkan akan diperoleh data yang hasilnya akan diolah dan dianalisis serta akhirnya ditarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat akan berlaku bagi seluruh populasi yang menjadi obyek penelitian.

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian yang digunakan adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta di Sub-Rayon 1 Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah 33 sekolah. Sekolah tersebut dipilih menjadi objek karena menggunakan sumber pendanaan BOS dari pemerintah. Adapun unit populasi yang digunakan

adalah SMP negeri dan swasta di Sub-Rayon 1 Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah unit populasi sebanyak 33 sekolah. Sedangkan, populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah di SMP negeri dan swasta di Sub-Rayon 1 Kabupaten Bandung Barat sejumlah 33 orang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey, yaitu teknik pengumpulan dan analisis data berupa opini dari subyek yang diteliti melalui kuesioner, wawancara dan observasi. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan skala likert (ordinal) dengan metode rating yang dijumlahkan. Adapun data yang disebarkan pada penelitian ini menggunakan diperoleh langsung dari responden dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan skala likert (ordinal) dengan metode rating yang dijumlahkan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

Pembahasan hasil penelitian merupakan kajian terhadap hasil temuan yang ada hubungannya dengan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, maka hipotesis yang berbunyi “terdapat

pengaruh yang signifikan antara manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat” dapat teruji keberlakuannya, dalam arti bahwa penelitian ini mampu menjawab

kebenaran hipotesis penelitian. Adapun pembahasan dalam penelitian ini diuraikan secara rinci sebagai berikut:

### **1. Gambaran Manajemen Pembiayaan Pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat**

Dalam penelitian ini, ditemukan hasil bahwa kemampuan kepala sekolah dalam melakukan tugas manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori tinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa berdasarkan tiga fase dimensi manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu yaitu *financial planning, implementation and evaluation* tergolong dalam kategori yang tinggi.

Berdasarkan keseluruhan dimensi, *implementation involves accounting* atau pelaksanaan pembiayaan dengan indikator kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan memiliki skor kecenderungan rata-rata tertinggi yaitu tergolong dalam kategori sangat tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana kepala sekolah mengupayakan pelaksanaan pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi sekolah serta Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, RKAS juga dapat menunjang pencapaian tujuan pendidikan melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Perencanaan dan pelaksanaan pembiayaan pendidikan sesuai dengan alikasi dana yang disampaikan pemerintah melalui dinas kabupaten masing-masing daerah. Oleh karena itu, berdasarkan rekap anggaran dana SMP di Kabupaten Bandung Barat pada sub-rayon 1 dapat terlihat jumlah besaran dana dan alokasi pada 33 sekolah di sub-rayon 1 yang mendapatkan bantuan operasional sekolah dari pemerintah.

Berdasarkan rekap penggunaan dana pada Lampiran 4, perencanaan pelaksanaan pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan pemerintah. Dalam alokasinya, pemerintah memberikan kewenangan kepada sekolah untuk menggunakan pembiayaan yang tersedia sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Komponen dasar yang menjadi arahan pemerintah dalam alokasi dana BOS tersebut diantaranya yaitu pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru membantu siswa miskin, pembiayaan pengelolaan bos, pembelian perangkat computer, dan biaya lainnya jika seluruh komponen telah terpenuhi pendanaannya dari BOS. Oleh karena itu, pada sekolah-sekolah dengan sumber dana yang berasal dari pemerintah, manajemen pembiayaan harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan guna mencapai visi misi sekolah.

### **2. Gambaran Fasilitas Pembelajaran SMP di Kabupaten Bandung Barat**

Pada penelitian ini, ditemukan bahwa kemampuan kepala sekolah dalam melakukan tugas manajemen pembiayaan pendidikan di SMP Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori sangat tinggi dengan skor kecenderungan rata-rata seluruh indikator dengan kriteria sangat kuat. Berdasarkan hasil tersebut artinya secara prinsip, sekolah telah sangat baik dalam mengelola fasilitas pembelajaran di sekolah.

Berdasarkan indikator yang diteliti, prinsip pencapaian tujuan, prinsip kejelasan tanggung jawab, dan prinsip kekohersifan memiliki skor

kecenderungan rata-rata yang tinggi. Hal tersebut jika melihat pada teori yang dikemukakan Mulyasa (2004, hlm 55) bahwa menurut prinsip pencapaian tujuan, manajemen perlengkapan sekolah dapat dikatakan berhasil bilamana fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat, pada setiap masyarakat sekolah yang akan menggunakannya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kelengkapan-kelengkapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan syarat kebijakan yang berlaku, walaupun pada kenyataannya masih sangat terbatas jumlah dan pemanfaatannya. Selain itu, dengan adanya tanggung jawab secara structural yang menetapkan seorang wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, maka prinsip kejelasan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan baik. Sesuai dengan prinsip kekohersifan, pengelolaan fasilitas pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana, tapi juga oleh seluruh masyarakat sekolah.

Pada penelitian ini, indikator prinsip efisiensi dan prinsip administratif masih berada pada kategori tinggi. Dengan prinsip efisiensi berarti bahwa pemakaian semua fasilitas sekolah hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengurangi pemborosan. Maka perlengkapan sekolah hendaknya dilengkapi dengan petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharannya. Petunjuk teknis tersebut di komunikasikan kepada semua personil sekolah yang di perkirakan akan menggunakannya. Pada kenyataannya, pemakaian dan pemanfaatan fasilitas sekolah tidak terlalu diperhatikan efisiensinya. Hal tersebut masih memerlukan perhatian lebih, terutama dalam penggunaan fasilitas pembelajaran yang belum seluruh

masyarakat sekolah mengetahui atau memanfaatkannya. Kebersihan dan kerapihannya pun terkadang menjadikan pemanfaatan fasilitas sekolah menjadi tidak terjaga dan menjadi sebuah pemborosan ketika tidak digunakan dengan baik. Secara prinsip administratif, setiap penanggung jawab pengelolaan perlengkapan pendidikan hendaknya memahami semua peraturan perundang-undangan tersebut dan menginformasikan kepada semua personel sekolah yang di perkirakan akan berpartisipasi dalam pengelolaan perlengkapan pendidikan.

### **3. Gambaran Mutu sekolah Siswa SMP di Kabupaten Bandung Barat**

Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa mutu sekolah SMP sub-rayon 1 Kabupaten Bandung Barat teridentifikasi pada kategori sangat tinggi. Hal ini didasarkan dari hasil perhitungan statistik dimana nilai rata-rata seluruh indikator yang ditunjukkan dengan kategori sangat tinggi. Berdasarkan hasil tersebut, mutu guru menjadi dimensi dengan skor kecenderungan rata-rata terendah. Dalam mengukur mutu guru tersebut, disebutkan indikator yang menentukannya dilihat dari kesesuaian jenjang pendidikan, jenis pelatihan dan beban mengajar. Mutu guru pada SMP di Kabupaten Bandung Barat memang terlihat dari 41% guru lulusan D3, 38% guru lulusan S1, 15% guru lulusan S2 dan S3, dan 6% guru lulusan SMA/SMK dan D1. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, pada sub-rayon 1 terdapat 824 orang guru dengan status PNS dan 904 orang guru dengan status Non PNS. Pada beberapa sekolah, kompetensi guru terkadang kurang diperhatikan. Oleh karena itu, muncul beberapa permasalahan, diantaranya penguasaan materi pelajaran masih rendah akibat latar belakang pendidikan yang masih belum sesuai

dengan bidangnya. Strategi pembelajaran juga masih menggunakan strategi yang kurang inovatif, serta penggunaan teknologi yang masih terbatas oleh kemampuan dan keterbatasan sarana. Evaluasi proses pembelajaran juga kurang diperhatikan.

Sedangkan untuk indikator lainnya, yaitu mutu siswa, lingkungan belajar, disiplin sekolah, kesediaan sumber belajar, partisipasi orang tua, satuan biaya, sudah berada pada kategori sangat tinggi. Mutu siswa memiliki skor kecenderungan rata-rata tertinggi. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Danim (2007, hlm 122) bahwa kualitas pendidikan dilihat dari hasil pendidikan dianggap bermutu jika mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Melihat hasil ujian, angka putus sekolah, dan angka lulusan siswa yang sudah berada di kategori sangat tinggi. Berdasarkan data BPS Kabupaten Bandung Barat tahun 2013, penduduk dengan kelompok umur 10-14 tahun berdasarkan partisipasi bersekolah mencapai 89,26% yang masih bersekolah, 0,68% yang tidak/belum sekolah, dan 10,06% tidak bersekolah. Sedangkan berdasarkan Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013, Kabupaten Bandung Barat memiliki penduduk dengan kelompok umur 13-15 tahun sejumlah 84.635 orang dengan jumlah APK sebesar 96,97% dan APM sebesar 76,39%. Hal tersebut menentukan bahwa pada usia anak duduk di bangku SMP, sudah banyak anak yang mendapatkan pendidikan meskipun masih ada anak yang tidak bersekolah dengan beberapa alasan tertentu.

Selain itu juga, partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan berada pada kategori

sangat tinggi, dimana hal tersebut didukung oleh partisipasi masyarakat sekitar yang lebih banyak memilih sekolah negeri atau sekolah swasta dengan bantuan dana dari pemerintah dengan alasan pembiayaan.

#### **4. Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan Terhadap Mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat**

Berdasarkan hasil penelitian terdapat hubungan yang cukup kuat antara manajemen pembiayaan pendidikan dengan mutu sekolah. Secara individual, hubungan manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan berkontribusi signifikan terhadap mutu sekolah. Sedangkan kontribusi manajemen pembiayaan pendidikan yang secara langsung mempengaruhi mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat sebesar 24,5%, dimana terdapat 75,5% sisanya merupakan pengaruh dari faktor lainnya. Dalam hal tersebut, pada tahap pelaksanaan pembiayaan sudah mencapai kategori sangat tinggi, dimana setiap kegiatan manajemen pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan pelaksanaan yang disusun sebelumnya. Hal tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan mengikat antara pembuatan RKAS dengan anggaran dana BOS yang dialokasikan pemerintah. Namun pada tahap perencanaan masih kurang dipahami oleh banyaknya kepala sekolah, karena pada tahap tersebut banyaknya perencanaan pembiayaan harus terikat kepada jumlah anggaran yang dialokasikan, sehingga terkadang pencapaian mutu sekolah masih sering terhambat. Terutama hal tersebut diakibatkan ketidakjelasan dan tidak tepatnya pencairan dana BOS pada setiap periodenya. Keterlambatan dan birokrasi yang rumit menghambat proses perencanaan.

Sedangkan pengaruh tidak langsung yang ditunjukkan oleh manajemen pembiayaan terhadap mutu pendidikan melalui variabel lain, dalam penelitian ini adalah melalui fasilitas pembelajaran menunjukkan pengaruh sebesar 11%. Hal tersebut membuktikan bahwa secara tidak langsung manajemen pembiayaan yang baik dapat mempengaruhi mutu pendidikan melalui pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan prinsip pemanfaatan fasilitas pembelajaran. Hal tersebut terbukti melalui efektifitas dan efisiensi pemanfaatan fasilitas. Jika pemanfaatan fasilitas dapat dilakukan secara efisien, maka secara pembiayaan tidak akan terjadi pemborosan. Sekolah dalam manajemen pembiayaannya akan mengalokasikan sumber dana yang didapatnya dengan efisien kepada komponen yang mengarah pada standar sarana dan prasarana. Pada Lampiran 4 disebutkan bahwa terdapat beberapa komponen yang dapat mempengaruhi hal tersebut, diantaranya adalah biaya pelaksanaan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengadaan perpustakaan, pengadaan bahan habis pakai, perawatan sekolah, serta jasa dan daya yang digunakan sekolah. Hal tersebut guna menunjang standar sarana prasarana yang akan mempengaruhi mutu sekolah. Berdasarkan hal tersebut, maka pengaruh secara langsung dan tidak langsung dari manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu sekolah menunjukkan total sebesar 35.5%.

#### **5. Pengaruh Fasilitas Pembelajaran Terhadap Mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat**

Fasilitas pembelajaran di SMP Kabupaten Bandung Barat menurut hasil penelitian berada pada kategori kecenderungan rata-rata yang sangat tinggi. Hal tersebut ditunjukkan oleh bagaimana manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran

mampu menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip manajemen pemanfaatan fasilitas pembelajaran. Berdasarkan hasil penelitian di SMP Kabupaten Bandung Barat terdapat hubungan yang sedang atau cukup kuat antara fasilitas pembelajaran dengan mutu sekolah secara individual pada variabel fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah ditunjukkan oleh hasil koefisien jalur menunjukkan bahwa fasilitas pembelajaran berkontribusi signifikan terhadap mutu sekolah. Kontribusi fasilitas pembelajaran (X2) yang secara langsung mempengaruhi mutu sekolah (Y) sebesar 26%, dan sisanya 74% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian di SMP Kabupaten Bandung Barat terdapat hubungan yang sedang atau cukup kuat antara fasilitas pembelajaran dengan mutu sekolah hal ini sebabkan secara prinsip pemanfaatan fasilitas pembelajaran, sekolah telah membuat struktur tanggung jawab dalam organisasi sekolah melalui adanya wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana. Hal tersebut mendukung prinsip kejelasan tanggung jawab yang dilakukan sekolah melalui wakil kepala sekolah tersebut. Namun, terkadang pada kondisi nyatanya, peran tersebut terkadang hanya dilakukan jika terjadi kerusakan atau pada saat akan adanya penilaian akreditasi pada sekolah tersebut. Oleh karena itu, secara administratif sekolah masih kesulitan dalam menerapkan peraturan dan tata cara penggunaan fasilitas sesuai dengan undang-undang kepada seluruh masyarakat sekolah. Selain itu, fasilitas kelas dan media pembelajaran juga perlahan mulai dikembangkan oleh sekolah. Seiring dengan perkembangan teknologi, pelatihan dan sosialisasi program-program yang menunjang perkembangan fasilitas pembelajaran seperti penggunaan media

projector, whiteboard, dan penggunaan internet telah semakin berkembang. Hal tersebut menuntut sekolah harus mampu menyesuaikan dan meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan sesuai visi dan misi sekolah.

Sedangkan pengaruh tidak langsung dari fasilitas pembelajaran terhadap mutu pendidikan melalui manajemen pembiayaan menunjukkan pengaruh sebesar 11.6%. Hal tersebut sesuai dengan prinsip efisiensi dan administrasi, pemanfaatan fasilitas pembelajaran masih belum efisien, masih sering terjadi pemborosan dan keterbatasan pengetahuan mengenai penggunaan fasilitas terutama dalam hal teknologi. Pengadaan standar sarana dan prasarana pada dasarnya telah dialokasikan oleh pemerintah dalam penganggaran dana BOS. Hal tersebut harus mampu dikelola oleh sekolah agar fasilitas pembelajaran yang diselenggarakan sesuai dengan visi dan misi sekolah.

#### **6. Pengaruh Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dan Fasilitas Pembelajaran Terhadap Mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat**

Berdasarkan hasil penelitian di SMP pada sub rayon 1 di Kabupaten Bandung Barat, besarnya hubungan antara manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran secara keseluruhan terhadap mutu sekolah menunjukkan pengaruh yang kuat. Besarnya hubungan antara

manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran secara keseluruhan terhadap mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat adalah 38.5%, artinya manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran berhubungan secara simultan dan signifikan dengan mutu sekolah. Sedangkan sisanya sebesar 61.5% ditentukan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pengaruh manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran terhadap mutu sekolah SMP di Kabupaten Bandung Barat terlihat dari bagaimana sekolah mengelola pembiayaan yang berasal dari pemerintah agar mampu membiayai seluruh kegiatan pembelajaran yang mampu menunjang pencapaian mutu sekolah. Kedua variabel manajemen pembiayaan dan fasilitas pembelajaran juga memiliki hubungan, dimana setiap prinsip pemanfaatan fasilitas pembelajaran didasarkan juga terhadap manajemen pembiayaan yang terdapat di sekolah. Keduanya secara bersama-sama akan mampu meningkatkan mutu sekolah di sekolah tersebut melalui proses pembelajaran yang baik. Keduanya merupakan instrument input yang mampu menunjang peningkatan mutu sekolah. Sehingga, dalam mempertahankan mutu sekolah, manajemen pembiayaan harus diperhatikan setiap tahapannya, dan fasilitas pembelajaran juga pada setiap prinsip pemanfaatannya.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **SIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang peneliti paparkan, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum kondisi manajemen pembiayaan pendidikan, fasilitas

pembelajaran dan mutu pendidikan teridentifikasi pada kategori baik.

2. Mutu sekolah SMP sub-rayon 1 Kabupaten Bandung Barat teridentifikasi pada kategori sangat tinggi. Berdasarkan hasil tersebut, mutu guru menjadi dimensi dengan skor



kecenderungan rata-rata terendah. Pada beberapa sekolah, kompetensi guru terkadang kurang diperhatikan. Sedangkan untuk indikator lainnya, yaitu mutu siswa, lingkungan belajar, disiplin sekolah, kesediaan sumber belajar, partisipasi orang tua, satuan biaya, sudah berada pada kategori sangat tinggi.

3. Pengaruh yang diberikan oleh manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori kuat. Rata-rata kecenderungan SMP di Kabupaten Bandung Barat sudah pada kategori yang sangat baik pada tahap pelaksanaan pembiayaan. Meskipun pada pelaksanaannya di lapangan masih belum sesuai dengan pencapaian standar nasional pendidikan. Beberapa kendala membuktikan masih perlu ditingkatkannya kembali pada tahapan perencanaan dan pengawasan pembiayaan pendidikan. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pencapaian mutu pendidikan sebagai tujuan sekolah.
4. Adapun pengaruh fasilitas pembelajaran terhadap mutu pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat dari hasil penelitian adalah signifikan walaupun menunjukkan pengaruh yang sedang atau cukup kuat. Hal ini disebabkan karena secara prinsip efektifitas dan administrasi, pemanfaatan fasilitas pembelajaran belum dilakukan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih sering terjadinya pemborosan dalam pemanfaatan fasilitas pembelajaran. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan para guru dan siswa dalam memanfaatkan fasilitas pembelajaran masih cenderung rendah.

Keterbatasan informasi dan teknologi menjadi kendala ketika harus melakukan pengadaan fasilitas, sehingga pencapaian mutu pendidikan masih belum optimal.

5. Manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran memberikan pengaruh terhadap mutu pendidikan SMP di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut ditunjukkan oleh pengaruh yang cukup kuat dari manajemen pembiayaan pendidikan terhadap mutu pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan dan fasilitas pembelajaran berpengaruh secara bersama-sama dalam peningkatan mutu pendidikan. Manajemen pembiayaan pendidikan juga memberikan pengaruh kepada fasilitas pembelajaran, dimana setiap pemanfaatan fasilitas pembiayaan harus didasari pada prinsip efisiensi terhadap kualitas dan kuantitas perlengkapan. Hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana manajemen pembiayaan mampu dikelola oleh sekolah sehingga mampu menunjang pengadaan dan perencanaan fasilitas pembelajaran. Pada akhirnya, kedua instrument input tersebut akan menunjang peningkatan mutu pendidikan melalui proses belajar mengajar di sekolah.

## **SARAN**

Dari hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan peneliti untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu diperhatikan kembali mutu guru. Pemberian pelatihan dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi pembelajaran bagi para guru. Selain itu, mempertahankan prestasi siswa dan

mencegah peningkatan angka putus sekolah harus diperhatikan oleh sekolah.

2. Peningkatan mutu pendidikan dapat dilakukan melalui pelaksanaan tahapan manajemen mutu yang optimal. Kepala sekolah sebagai tugas manajerial harus mampu memahami tugas dan proses manajemen pembiayaan pendidikan. Penyusunan RKAS bagi sekolah dengan sumber pendanaan dari BOS memiliki keterikatan secara tidak langsung dengan alokasi dana yang diberikan pemerintah. Perencanaan dan pengawasan penggunaan pembiayaan tersebut perlu ditingkatkan agar mampu mencapai mutu pendidikan yang baik. Hendaknya tugas setiap proses manajemen pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan tenaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Perencanaan diharapkan mampu memenuhi standar nasional pendidikan sehingga mampu mencapai peningkatan mutu pendidikan.
3. Pemanfaatan fasilitas pembelajaran harus lebih dioptimalkan sesuai prinsip manajemen fasilitas pembelajaran. Secara prinsip,

efisiensi pemanfaatan fasilitas perlu diperhatikan, guna mencegah terjadinya pemborosan dan menjaga fasilitas yang disediakan. Selain itu, pelatihan kepada guru-guru juga peserta didik dalam menggunakan fasilitas pembelajaran perlu diperhatikan. Tingkatkan kembali pelatihan bagi guru-guru guna menungjang kemampuannya menggunakan fasilitas pembelajaran dengan lebih optimal. Tugas megawasi pemanfaatan fasilitas tidak hanya terletak pada kepala sekolah, namun sekolah memilih jabatan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana untuk mencapai prinsip kejelasan tanggungjawab bagi setiap pemanfaatan fasilitas pembelajaran.

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian di bidang manajemen pembiayaan masih sangat luas, sehingga masih dapat dikembangkan kembali. Penelitian mengenai mutu pendidikan memiliki banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan kembali penelitian berdasarkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi mutu pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akdon. (2008). *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian Untuk Administrasi dan Manajemen*. Bandung: Dewa Ruchi.
- Akdon., dkk. (2015). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ali, M. (2007). Penjaminan Mutu Pendidikan. Dalam Tim pengembang Ilmu Pendidikan UPI-FIP, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* (hlm. 341-364). Bandung: PT Imtima Grafindo.

- Danim, S. (2007). *Visi Baru Manajemen Sekolah dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik*. Bandung: Bumi Aksara.
- Engkoswara., Komariah. (2011). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Fattah, N., dan Nurdin, D. (2007). Ekonomi Pendidikan. Dalam Tim pengembang Ilmu Pendidikan UPI-FIP, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* (hlm. 341-364). Bandung: PT Imtima Grafindo.
- Fattah, N. (2009). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Hajarisman, Nuzar. (2007). *Statistika : Bahan Perkuliahan Pascasarjana*. Bandung : UNPAD.
- Husaini, U. (2009). *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hoy, C. et al. (2000). *Improving Quality in Education*. London: Falmer Press.
- Jones, T.H. (1985). *Introduction to School Finance: Technique and Social Policy*. New York: Macmillan Publishing Company Jones.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sagala, S. (2010). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sallis, E. (2012). *Total Quality Management in Education*.
- Somantri, M. (2004). *Perencanaan Pendidikan*. Bogor: IPB Press.
- Stoops, E. & Johnson, R.E. (1967). *Elementary Schools Administration*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2013). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Rafika Aditama.
- Supriadi, D. (2006). *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suyanto., & Abbas, M. S. (2001). *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa*. Yogyakarta: Adicita.
- Wahyu, S. A. A. (2007). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Jakarta: CV Multi Karya Mulia.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IX Standar Pembiayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan